

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2016, sebagai capaian kinerja tahun terakhir pelaksanaan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2012 - 2017 dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Adapun tujuannya untuk melihat sejauh mana keberhasilan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. LAKIP ini juga digunakan sebagai tolak ukur pencapaian Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Akhirnya laporan ini kami harap dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung demi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang untuk kemajuan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Pangkalpinang, Maret 2017

KEPALA DINAS

Dr. dr. HENDRA KUSUMAJAYA, M.Epid
Pembina Utama Madya
NIP. 19590117 199003 1 007